

WES - Newsletter

WATER and ENVIRONMENTAL SANITATION

AIR MINUM dan PENYEHATAN LINGKUNGAN



Media Informasi Proyek WES-UNICEF Kerjasama Pemerintah RI dan UNICEF

Agenda

- ◆ 01 Maret 2010
Pembentukan Pokja AMPL di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur
- ◆ 03 - 07 Maret 2010
Berpartisipasi dalam Pameran Pembangunan AMPL Memperingati HUT 1 Abad Kota Jayapura
- ◆ 09 Maret 2010
Pembahasan Draft Pedoman Umum & Petunjuk Pelaksanaan STBM Ditjen PP-PL, Kementerian Kesehatan - Jakarta
- ◆ 12 Maret 2010
Pertemuan Pembahasan Persiapan Program *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH) di Indonesia Timur Jakarta
- ◆ 23 Maret 2010
Konferensi Internasional dan Pameran "Solusi Pengelolaan Air Limbah Terdesentralisasi di Negara-negara Berkembang" Surabaya
- ◆ 25 Maret 2010
Pelatihan Tenaga Admin dan Pelaporan Tingkat Pusat Hotel Horison - Bekasi
- ◆ 29 Maret 2010
Pendampingan Musrenbangda Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua Tahun 2010
- ◆ 13 April 2010
Lokakarya Pusat Informasi Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (PIN AMPL) Hotel Akmani - Jakarta

Kisah Jamban Sederhana dari Kampung Wasegi Indah

Kampung Wasegi terletak 65 km dari Manokwari, Provinsi Papua Barat, dan dapat ditempuh melalui jalan darat selama 1 jam 10 menit. Wilayah ini termasuk dalam Distrik Prafi dengan penduduk kurang lebih 1,500 orang yang merupakan campuran dari warga asli Papua dan pendatang. Suku asli Papua yang tinggal termasuk dalam Suku Meah. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan buruh pada perkebunan kelapa sawit. Kampung ini juga menghasilkan buah-buahan seperti duku, coklat dan rambutan.

Program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) sudah dimulai di Kampung Wasegi sejak tahun 2008. Pendanaan program didukung UNICEF dimana proses implementasinya dilakukan oleh Dinas/SKPD terkait di Kabupaten Manokwari. Dinas-dinas tersebut berkoordinasi dalam satu wadah yang disebut Pokja AMPL (Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) yang rutin melakukan rapat koordinasi dan

evaluasi setiap tiga bulan sekali.

Dalam pelaksanaannya, Pokja AMPL turun ke kampung-kampung melatih kader-kader desa untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya sanitasi. Kader-kader ini berperan sebagai pemacu untuk mengubah perilaku masyarakat yang sebelumnya Buang Air Besar Sembarangan (BABS) agar bersedia membangun jamban sederhana di rumah mereka.

Sampai saat ini tercatat sudah 18 jamban sederhana dibangun di Wasegi Indah. Meski jumlahnya masih sedikit dari target yang diharapkan, tapi hal ini telah mampu mengubah kebiasaan penduduk setempat untuk lebih memperhatikan pentingnya masalah sanitasi lingkungan. Selain kegiatan pembangunan jamban, UNICEF juga berupaya mendorong warga kampung membangun sarana penampungan air sederhana yang bersumber dari air hujan atau aliran sungai. ■ **Febriansyah Soebagio** *Fasilitator Pokja AMPL Provinsi Papua Barat*



Contoh jamban sederhana (kiri), seorang kader desa bergambar di depan jamban
foto: Febry

Harmonisasi antara Program Pembangunan Nasional Sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dan Bantuan Luar Negeri di Provinsi Papua Barat

Studi Lembaga Pengembangan Masyarakat Universitas Indonesia (LPM UI) menemukan bahwa masalah dasar air minum dan sanitasi di Provinsi Papua Barat terletak pada beberapa aspek diantaranya: kurangnya jumlah fasilitas sanitasi, kurangnya pengetahuan, dan sikap murid terkait kebersihan diri dan pola makan.

Untuk itu, diperlukan langkah penanganan dalam mengurangi angka diare dan kematian ibu dan bayi akibat sanitasi yang buruk. Pemerintah RI, diwakili oleh Bappenas, bekerja sama dengan UNICEF menggagas sebuah program pembangunan untuk sektor air minum dan penyehatan lingkungan yang pada perkembangannya tergabung dalam Gerakan Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Pada dasarnya, program STBM di Provinsi Papua Barat telah berlangsung sejak tahun 2008, meliputi 27 Kampung di empat kabupaten yaitu Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Manokwari.

Fokus pelaksanaan program adalah mengubah perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dengan mempraktekkan perilaku tidak Buang Air Besar Sembarangan (BABS), mengelola air minum dengan benar, dan mengelola sampah rumah tangga.

Untuk menjamin keterlaksanaan program, UNICEF dan Bappenas menggandeng pemerintah provinsi sebagai institusi koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan, disamping bekerja sama dengan dinas-dinas terkait dari kabupaten.

Pembagian peran yang disepakati adalah bappeda kabupaten bertindak sebagai sumber koordinasi, dinas pendidikan bertanggung jawab untuk terlaksananya kegiatan kampanye CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) dan perbaikan jamban sekolah, dinas kesehatan untuk kampanye CTPS dan promosi bebas BABS di kampung-kampung, dinas pekerjaan umum untuk pembangunan sumur air sederhana, dan terakhir, badan pemberdayaan masyarakat untuk sosialisasi program dan penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) tingkat desa/kampung.

Dalam upaya menekan angka BABS di tiap kampung, program ini mengandalkan kader-kader desa yang membantu sosialisasi pentingnya jamban di tiap rumah. Program ini tidak membangun jamban tapi memicu kesadaran masyarakat untuk membangun

jamban sederhana dan tertutup.

Tidak hanya di masyarakat, program juga diorientasikan kepada siswa-siswa sekolah dasar. Siswa diberikan materi tentang air bersih, pola hidup sehat, dan sanitasi dalam bentuk pelajaran olah raga, biologi, lingkungan, pemeriksaan kuku, cuci tangan, dan kerja bakti membersihkan sekolah. Dari pembelajaran ini, sebanyak 43% sekolah melakukan promosi ke masyarakat tentang apa yang diajarkan di tempat mereka.

Beberapa catatan terkait permasalahan dan tantangan yang dihadapi sejauh ini di lapangan adalah:

1. Tingkat partisipasi masyarakat masih kurang
2. Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah
3. Lambatnya penyaluran dana dan bantuan
4. Kurangnya tenaga ahli yang berdampak pada lambatnya proses pembangunan
5. Birokrasi yang menyulitkan

Meskipun demikian, secara keseluruhan pendekatan yang diterapkan dinilai mampu mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih sehat kendati masyarakat dituntut lebih mandiri dan berswadaya akibat tidak disediakannya subsidi. Beberapa kampung tercatat telah berhasil mencapai target pelatihan tenaga kader dan pembangunan jamban sederhana di rumah-rumah. Kesuksesan ini hendaknya ditiru di daerah-daerah lain di Provinsi Papua Barat. ■ **Febriansyah Soebagio** Fasilitator Pokja AMPL Provinsi Papua Barat

foto: Febray



Menakar Solusi Sanitasi Negara Berkembang

LSM internasional “Save The Children” mencatat tidak kurang dari 2,5 juta orang di seluruh dunia hidup tanpa akses terhadap sarana sanitasi. Di tanah air sendiri angkanya tidak kalah fantastis. Diperkirakan 100 juta orang yang hidup tanpa akses sanitasi layak. Kekhawatiran bertambah besar tatkala diketahui bahwa hampir 1,5 juta anak di dunia -kurang lebih 4.000 anak setiap hari- meninggal setiap tahunnya karena meminum air yang tidak higienis.

Kondisi ini menyuratkan kebutuhan yang mendesak akan penanganan sanitasi bagi masyarakat miskin di seluruh dunia, terlebih di negara-negara berkembang. Untuk menjawab hal itu, Bappenas yang diwakili oleh Pokja AMPL menggandeng Asian Development Bank (ADB) bersama mitra-mitra

lainnya menyelenggarakan sebuah konferensi dan pameran internasional bertemakan air minum dan sanitasi di negara berkembang.

Konferensi berlangsung di Kota Surabaya, 23-26 Maret 2010, dan dihadiri oleh 185 orang dari 24 negara. Peserta sebagian besar merupakan kalangan ahli, praktisi, LSM, dan perwakilan pemerintah. Mereka datang untuk mendiskusikan solusi pembangunan air minum dan sanitasi di negara berkembang meliputi aspek Opsi Teknologi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Manajemen Sarana Sanitasi yang Berkelanjutan.

Tidak kurang empat puluh makalah yang dipresentasikan bersama berlangsungnya pameran dari tujuh institusi dalam dan luar negeri. Mengutip pernyataan Andreas Ulrich, Direktur



foto: Sacha

Bremen Overseas Research and Development Association (Borda) dalam sambutannya, “Melalui konferensi ini diharapkan akan diperoleh masukan-masukan dari peserta yang berasal dari berbagai latar belakang profesi sehingga dapat memberikan sumbangan berharga bagi pendekatan maupun konsep pelaksanaan pembangunan sanitasi baik di Indonesia maupun di negara berkembang lainnya”. ■ **SAZ**

Membidani Lahirnya Pusat Informasi Air Minum Nasional

Dewasa ini disadari bahwa sukses tidaknya suatu program pembangunan tidak terlepas dari sejauh mana pesan-pesannya dikomunikasikan. Sejalan dengan upaya pengkampanyean pembangunan sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) di Indonesia, Kelompok Kerja (Pokja) AMPL Nasional bekerjasama dengan WASPOLA Facility menyelenggarakan sebuah lokakarya bertajuk “Pengembangan Pusat Informasi Nasional (PIN) AMPL” pada Selasa (13/4) di Hotel Akmani, Jakarta.

Dalam sambutan yang disampaikan oleh Budi Hidayat, Direktur Perumahan dan Pemukiman Bappenas dikatakan bahwa “Pusat Informasi Nasional AMPL merupakan suatu *resource center* yang akan mengumpulkan, mengelola dan mendiseminasi-

kan data dan informasi yang terkait dengan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Indonesia.”

“Kami berharap, keberadaan PIN AMPL ini akan membantu para pemangku kepentingan dalam mendapatkan data dan informasi terkait masalah sanitasi, air bersih, dan kesehatan lingkungan,” tambah Budi.

Sementara itu, Ketua Harian Pokja AMPL, Oswar Mungkasa menegaskan dirinya bersyukur karena lokakarya ini telah berhasil menyerap berbagai masukan yang tentu akan bermanfaat sebagai bahan perumusan konsep pengembangan PIN AMPL.

Berbekal apa yang telah dicapai oleh Pokja AMPL selama ini dalam mengembangkan manajemen pengetahuan maka sebagai tindak lanjut acara ini dibentuklah sebuah tim kecil yang terdiri dari enam orang pe-

mangku kepentingan dari unsur akademisi, praktisi, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengawal perumusan konsep, visi, dan misi PIN AMPL. “Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, pusat pengetahuan ini dapat diluncurkan”, harap Oswar. ■ **EKO**



Oswar Mungkasa (Pokja AMPL Nasional), sedang menjelaskan konsep PIN foto: Meddy

Pelatihan Administrator Situs Kerjasama RI-UNICEF



foto: Ferdy

Situs kerjasama RI-UNICEF (www.khppia.org) adalah media yang direncanakan menjadi wadah terintegrasinya laporan dan info kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari kesepakatan kerjasama RI-UNICEF.

Pelatihan dibuka secara resmi

oleh Yosi Diani Tresna dari Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat (KGM), Bappenas pada Kamis (25/3) mewakili Arum Atmawikarta -Direktur KGM Bappenas- yang berhalangan hadir. Menurut beliau, terdapat dua hal yang melatarbelakangi diciptakannya situs ini yaitu penyebaran informasi keberhasilan program dan percepatan pengumpulan laporan.

Hari pertama pelatihan diisi oleh materi teori komunikasi umum, perkembangan terkini media *online*, dan pelatihan teknik penambahan berita pada situs. Sementara hari kedua lebih menekankan pada pelatihan jurnalistik dan apa saja yang harus dilakukan untuk menciptakan sebuah berita yang "layak baca".

Di penghujung acara, Ibu Yosi kembali menjadi pembicara untuk

menyampaikan harapan dan rencana tindak lanjut dari pelatihan ini. Adapun poin-poin yang diusulkan diantaranya:

1. Terintegrasinya informasi dan pelaporan kegiatan-kegiatan yang didanai oleh program kerjasama RI-UNICEF
2. Pembentukan Tim Redaksi khppia.org yang secara resmi disahkan oleh Surat Keputusan Deputi SDM dan Kebudayaan Bappenas
3. Pertemuan lanjutan tiga bulan mendatang untuk mengevaluasi kerja tim
4. Peserta mengirimkan berita *online* tentang kegiatan-kegiatan yang didanai oleh program kerjasama RI-UNICEF

Semoga pelatihan ini dapat bermanfaat baik secara internal antar-lembaga maupun secara eksternal, dimana diharapkan kehadiran situs mampu berperan sebagai media yang memperkaya khazanah informasi publik akan pembangunan bangsa.

■ FD

Pendampingan Musrenbangda Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Tahun 2010

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, pada tanggal 29-31 Maret 2010 Pemerintah Kabupaten Jayapura menggelar Musrenbangda di wilayahnya. Hasil kegiatan ini selanjutnya menjadi masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Jayapura tahun 2010.

Untuk dapat mengarusutamakan pembangunan dan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) di tingkat Kabupaten/Kota secara efektif, efisien, dan berkelanjutan maka Kelompok Kerja (Pokja) AMPL Nasional, yang diwakili oleh Fasilitator Kelembagaan di wilayah tersebut, berkewajiban untuk men-

dampingi kegiatan strategis ini. Kegiatan pendampingan Musrenbangda Kabupaten Jayapura bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan AMPL terutama dalam hal pengalokasian dana.

Evaluasi kegiatan pendampingan Musrenbangda Kabupaten Jayapura yaitu pertama, masih belum jelasnya penetapan arah kebijakan program AMPL/STBM yang dicerminkan dari prioritas pembangunan dan plafon/pagu dana yang minim. Kedua, penurunan alokasi dana disebabkan oleh pilkada yang nyaris serentak sehingga menyedot anggaran daerah yang sangat besar. Ketiga, belum tersusunnya indikator keberhasilan dan prioritas program AMPL baik yang sedang maupun yang akan dilaksanakan. ■

Aji Surya – Fasilitator Kelembagaan Provinsi Papua



WES-UNICEF

**Water and
Environmental
Sanitation**

Gedung Wisma Bakrie II, Lt.5
Jl. HR Rasuna Said Kav. B-2
Kuningan - Jakarta
Telp./Fax.: (6221) 57942100
email:

sekretariat@wes-riunicef.org

<http://wes-riunicef.org>